

PERAN STATISTIK ADMINISTRASI DALAM EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI LITERATUR

Sri Yulianti Mozin¹⁾, Utamy S. Dumbela²⁾, Dea Ayu Lestari³⁾, Rini Ramadhani⁴⁾, Nurul Nazwa Noho⁵⁾.

¹Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
yulmozin@ung.ac.id

²Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
utamydumbela@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
lestarideaayu947@gmail.com

⁴Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
riniramadhani0831@gmail.com

⁵Prodi. Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo
nurulnazwanoho05@gmail.com

ABSTRAK

Statistik administrasi memiliki peran penting dalam mengevaluasi kebijakan publik, terutama dalam mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Dengan data yang akurat dan analisis yang tepat, pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran statistik administrasi dalam proses evaluasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistik administrasi berkontribusi dalam pengumpulan data yang relevan, pemantauan kebijakan, serta perbaikan kebijakan berbasis temuan empiris.

Kata kunci: Statistik administrasi, evaluasi kebijakan, pengambilan keputusan, kebijakan publik.

ABSTRACT

Administrative statistics play an important role in evaluating public policies, especially in measuring the effectiveness and efficiency of policy implementation. With accurate data and proper analysis, policymakers can make evidence-based decisions to improve public welfare. This study aims to examine the role of administrative statistics in the policy evaluation process. The method used in this study is a literature study with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that administrative statistics contribute to the collection of relevant data, policy monitoring, and policy improvement based on empirical findings.

Keyword: *Administrative statistics, policy evaluation, decision-making, public policy.*

Submisi: 04-05-2025

Diterima: 04-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

Statistik administrasi memainkan peran vital dalam evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang kebijakan publik. Dalam konteks administrasi publik, statistik tidak sekadar deretan angka, melainkan alat analisis yang memungkinkan pemerintah menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan data yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, informasi yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan penafsiran, penilaian, dan pemberian nilai terhadap hasil kebijakan. Evaluasi ini harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan, serta memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Pendekatan berbasis data memungkinkan pembuat kebijakan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan suatu kebijakan secara lebih terarah dan berdasarkan bukti empiris. Dalam proses pengambilan keputusan, statistik administrasi menjadi fondasi utama agar keputusan yang diambil lebih rasional dan berbasis data.

Dalam era digital, penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data statistik administrasi semakin penting. Implementasi aplikasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) membantu dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, memungkinkan analisis data yang lebih efisien dan real-time.

Kebijakan publik, sebagai tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, memerlukan dukungan statistik administrasi dalam perumusannya. Statistik administrasi berperan dalam mengidentifikasi masalah sosial yang perlu diatasi, mengukur dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis aplikasi e-Open di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Hanya satu dari enam kriteria evaluasi yang terpenuhi, yaitu ketepatan, sementara efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan.

Evaluasi layanan publik pada platform *e-Government* menggunakan Indeks Layanan Publik Elektronik dan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) menunjukkan bahwa meskipun indeks layanan elektronik menunjukkan penilaian yang sangat baik, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja aktual dan harapan pengguna, menegaskan perlunya perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan pengguna.

Pengaruh implementasi kebijakan statistik terhadap manajemen survei dalam mewujudkan efektivitas kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen survei dan efektivitas kinerja pegawai lapangan.

Dengan demikian, statistik administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan perbaikan kebijakan publik. Penguatan sistem statistik administrasi harus menjadi prioritas dalam reformasi kebijakan publik untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan mensintesis berbagai pemikiran, teori, serta temuan-temuan empiris yang relevan dari sumber-sumber

ilmiah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran statistik administrasi dalam evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, sumber-sumber yang dijadikan rujukan meliputi jurnal-jurnal akademik terkini (khususnya lima tahun terakhir), buku-buku ilmiah, laporan kebijakan dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional, serta dokumen resmi lain yang relevan.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan fenomena secara sistematis dan mendalam, serta menganalisis hubungan antar konsep yang ditemukan dalam literatur. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang ada, tetapi juga untuk memahami keterkaitan konseptual dan implikasi praktis dari penggunaan statistik administrasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menghasilkan interpretasi teoritik dan refleksi kritis terhadap peran statistik dalam konteks administrasi publik.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri publikasi yang memiliki nomor Digital Object Identifier (DOI) guna menjamin validitas dan keandalan referensi. Artikel-artikel dari database jurnal akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan Scopus dijadikan acuan utama. Kriteria inklusi yang digunakan adalah publikasi yang relevan dengan tema statistik administrasi, evaluasi kebijakan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Sementara itu, publikasi yang bersifat opini, tidak terverifikasi, atau tidak memiliki kejelasan metodologi dikeluarkan dari bahan kajian.

Data yang diperoleh dari literatur dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, menemukan pola-pola argumentasi, dan menggali hubungan logis antar konsep. Fokus utama dari analisis adalah untuk menilai bagaimana statistik administrasi digunakan dalam evaluasi kebijakan, serta bagaimana data statistik berkontribusi terhadap perumusan, pelaksanaan, dan revisi kebijakan publik.

Selain itu, dalam analisis dilakukan pula sintesis teoritik guna mengintegrasikan berbagai pandangan dan temuan ilmiah dari sumber yang berbeda ke dalam satu kerangka pemahaman yang kohesif. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi yang kuat dan menyeluruh mengenai pentingnya statistik administrasi sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Validitas dari hasil kajian diperkuat melalui strategi triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber (jurnal akademik, buku ilmiah, dan laporan kebijakan resmi) guna memastikan konsistensi dan kesesuaian antar data. Strategi ini juga bertujuan untuk meminimalkan bias penafsiran dan meningkatkan reliabilitas temuan.

Dengan pendekatan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang peran statistik administrasi dalam kebijakan publik. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, analis kebijakan, dan akademisi dalam merancang kebijakan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Statistik Administrasi dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Statistik administrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses evaluasi kebijakan publik. Peran ini terutama terlihat dalam kemampuannya menyediakan data yang akurat, sistematis, dan berkelanjutan mengenai implementasi suatu kebijakan. Statistik administrasi, yang diperoleh melalui pencatatan formal di instansi pemerintah, dapat menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan dari waktu ke waktu secara terukur. Data ini tidak hanya mencerminkan

kondisi aktual di lapangan, tetapi juga memberikan gambaran historis yang memungkinkan pembuat kebijakan untuk melakukan komparasi antar periode dalam melihat tren atau perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, statistik berfungsi bukan sekadar sebagai informasi pasif, melainkan menjadi instrumen evaluatif yang proaktif dan prediktif.

Penggunaan statistik administrasi dalam evaluasi kebijakan berfokus pada pengukuran tiga jenis indikator utama, yakni input, output, dan outcome. Indikator input mencakup sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Indikator output mengukur hasil langsung dari kegiatan kebijakan, misalnya jumlah layanan yang diberikan atau produk yang dihasilkan. Sementara itu, indikator outcome berkaitan dengan dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat, seperti perubahan tingkat kesejahteraan atau akses terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, data statistik administratif yang valid dan reliabel membantu memastikan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan komprehensif (Febrianti et al., 2023).

Lebih jauh, keberadaan statistik administrasi memberikan kerangka faktual bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Pemerintah dapat memanfaatkan data ini untuk mengetahui apakah suatu program atau kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, serta apakah kebijakan tersebut perlu diteruskan, disesuaikan, atau dihentikan. Dalam studi oleh Khairu Nissa et al. (2020), evaluasi berbasis data terhadap kebijakan pembatasan mobilitas di Jakarta selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa statistik dapat digunakan untuk menilai efektivitas intervensi pemerintah secara cepat dan tepat. Dengan demikian, statistik administrasi bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga sarana manajemen risiko kebijakan.

Dalam praktiknya, statistik administrasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur ketepatan sasaran suatu kebijakan. Misalnya, kebijakan yang ditujukan kepada kelompok rentan seperti rumah tangga miskin atau penyandang disabilitas, dapat dievaluasi berdasarkan distribusi bantuan dan pencapaian sasaran yang terdata secara administratif. Penelitian oleh Rusdy et al. (2024) mengenai pelayanan administrasi kependudukan berbasis aplikasi e-Open menunjukkan bahwa ketepatan dalam pelayanan publik hanya tercapai sebagian, karena masih terdapat celah antara rencana kebijakan dengan implementasi di lapangan. Di sinilah peran statistik menjadi sangat penting, karena mampu mengungkap inkonsistensi antara data perencanaan dan data pelaksanaan.

Selain itu, evaluasi layanan publik berbasis platform digital yang dianalisis oleh Permatasari et al. (2024) menggunakan statistik kuantitatif dan metode Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan bahwa meskipun indeks layanan publik elektronik bernilai baik, terdapat kesenjangan antara harapan pengguna dan kinerja aktual. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa statistik administrasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat dan efektivitas teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Statistik administrasi juga berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika data-data administrasi tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik serta pemangku kepentingan lainnya, proses evaluasi kebijakan menjadi lebih partisipatif. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang mengedepankan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Dengan begitu, statistik administrasi tidak hanya menjadi milik pemerintah, tetapi juga alat kontrol sosial yang memperkuat demokrasi partisipatif.

Peran strategis statistik dalam evaluasi kebijakan semakin menguat dengan hadirnya sistem digitalisasi data pemerintahan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Ro'son et al. (2024) menunjukkan bahwa melalui SIPD, perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menandai transformasi statistik administrasi dari sekadar alat pelaporan menjadi sistem informasi manajemen yang mendukung siklus kebijakan secara keseluruhan.

Terakhir, efektivitas pelaksanaan kebijakan juga sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga statistik dalam mengelola data survei dan statistik administratif secara integratif. Studi Rojab (2016) tentang pengaruh implementasi kebijakan statistik terhadap kinerja pegawai lapangan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung penguatan statistik mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyajian data di lapangan, yang pada gilirannya berdampak pada akurasi evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, statistik administrasi memiliki kontribusi yang sangat luas dan mendalam dalam setiap tahapan evaluasi kebijakan publik. Tidak hanya mendukung proses penilaian formal, tetapi juga memperkuat daya analitis pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Statistik Administrasi dalam Pemantauan Kebijakan

Statistik administrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya dalam evaluasi akhir kebijakan, tetapi juga dalam tahap pemantauan (monitoring) yang dilakukan secara berkala sepanjang siklus kebijakan. Pemantauan kebijakan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, statistik administrasi menyediakan data yang bersifat real-time dan kontinu dari berbagai sektor pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya pelacakan perkembangan kebijakan secara langsung dan berkesinambungan.

Keunggulan statistik administrasi terletak pada sifatnya yang sistematis dan terstruktur karena dikumpulkan langsung dari proses pelayanan publik sehari-hari. Misalnya, dalam kebijakan kesejahteraan sosial, data mengenai jumlah penerima bantuan sosial, waktu dan jumlah penyaluran dana, serta perbandingan kondisi sosial-ekonomi sebelum dan sesudah intervensi, dapat diperoleh dari sistem administrasi di kementerian sosial dan lembaga terkait. Sebagaimana diungkapkan oleh Febrianti et al. (2023), penggunaan data statistik administrasi membantu dalam mengidentifikasi dampak jangka pendek dan menengah dari suatu kebijakan secara lebih cepat dan efisien.

Dalam konteks pemantauan kebijakan publik, data statistik administratif menjadi alat untuk mendeteksi lebih awal adanya ketidaksesuaian atau anomali dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah dapat segera mengoreksi kebijakan sebelum dampaknya menjadi luas. Seperti ditunjukkan dalam studi oleh Khairu Nissa et al. (2020), statistik mobilitas masyarakat yang dikumpulkan selama masa pandemi digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketika data menunjukkan adanya peningkatan mobilitas yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, intervensi cepat dapat segera dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan statistik administrasi dalam pemantauan juga diperkuat dengan hadirnya teknologi informasi dan platform digital pelayanan publik. Dalam studi yang dilakukan oleh Permatasari et al. (2024), ditemukan bahwa sistem e-government berbasis platform digital memungkinkan pemantauan kinerja pelayanan publik dilakukan secara lebih akurat dan dapat ditelusuri jejak datanya. Melalui metode Importance Performance Analysis (IPA), diperoleh bahwa pemantauan berbasis data dapat memperlihatkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja pelayanan publik yang diberikan. Informasi seperti ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pemantauan kebijakan yang berbasis statistik administrasi juga berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Data yang

tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada lembaga pengawasan formal, tetapi juga kepada warga negara sebagai penerima manfaat kebijakan. Sebagaimana dicatat dalam studi Rusdy et al. (2024), transparansi data pada layanan kependudukan melalui aplikasi e-Open menjadi sarana akuntabilitas yang penting, meskipun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan teknis yang perlu diperbaiki.

Selain itu, sistem informasi pemerintah yang terintegrasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) semakin memperkuat fungsi pemantauan berbasis data. Melalui platform ini, statistik administrasi yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem monitoring kebijakan pembangunan daerah. Studi oleh Ro'son et al. (2024) menunjukkan bahwa SIPD telah meningkatkan efisiensi pemantauan dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan langsung terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan target program yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam kerangka manajemen publik modern, pemantauan kebijakan yang responsif menjadi elemen penting dari pendekatan adaptive governance, yaitu pemerintahan yang mampu belajar dari data dan menyesuaikan kebijakan secara dinamis terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, statistik administrasi tidak hanya dilihat sebagai catatan administratif semata, tetapi sebagai aset strategis untuk perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Hal ini selaras dengan pandangan dalam literatur kebijakan publik terbaru yang menekankan pentingnya sistem informasi yang memungkinkan pemantauan interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa statistik administrasi berperan krusial dalam pemantauan kebijakan publik secara berkala. Melalui data yang konsisten dan akurat, pemerintah memiliki dasar kuat untuk melakukan penyesuaian strategi kebijakan, menghindari kegagalan implementasi, serta meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Peran ini menjadi semakin vital di era digitalisasi administrasi publik, di mana kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci dalam merespons dinamika sosial secara efektif.

3. Statistik Administrasi sebagai Dasar Perbaikan Kebijakan

Statistik administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas kebijakan saat ini, melainkan juga menjadi fondasi utama dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan. Dengan menganalisis data historis yang diperoleh secara sistematis dari berbagai proses administrasi pemerintahan, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi pola-pola keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi pada implementasi kebijakan sebelumnya. Analisis ini memungkinkan terjadinya refleksi kritis dan pembelajaran organisasi sehingga kebijakan yang dirumuskan berikutnya dapat lebih matang, terarah, dan berbasis pada temuan empiris yang valid (Febrianti et al., 2023).

Dalam konteks sektor pendidikan, data statistik administrasi berperan penting dalam menginformasikan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, data tentang angka putus sekolah, tingkat kelulusan, serta distribusi tenaga pendidik yang dikumpulkan secara administratif menjadi dasar analisis kritis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Informasi ini membantu dalam merancang program-program intervensi yang fokus pada daerah atau kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Studi oleh Khairu Nissa et al. (2020) menekankan pentingnya integrasi data statistik administrasi dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan pendidikan selama pandemi, ketika akses dan kualitas

pendidikan menjadi tantangan utama.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga sangat diuntungkan dengan pemanfaatan statistik administrasi dalam perbaikan kebijakan. Data administratif mengenai angka kematian ibu dan bayi, cakupan imunisasi, serta distribusi fasilitas kesehatan menjadi indikator penting dalam menentukan arah kebijakan kesehatan ibu dan anak. Dengan informasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah dengan tingkat risiko tinggi dan mengarahkan program kesehatan secara lebih efektif. Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan data statistik administrasi pada layanan kesehatan berbasis digital memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, penggunaan statistik administrasi sebagai dasar perbaikan kebijakan juga memungkinkan pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berubah cepat. Melalui sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi seperti SIPD, data dari berbagai sektor dapat disinergikan sehingga perumusan kebijakan tidak lagi dilakukan secara parsial atau sektoral. Studi Ro'son et al. (2024) memperlihatkan bagaimana integrasi data statistik administrasi dalam SIPD membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan kebijakan pembangunan secara lebih holistik dan berorientasi hasil.

Selain perbaikan kebijakan berbasis data, statistik administrasi juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas manajemen publik. Data yang akurat dan terpercaya memberikan dasar bagi peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam menyusun program kerja, penganggaran, dan pelaksanaan. Rusdy et al. (2024) dalam kajiannya mengenai administrasi kependudukan menegaskan bahwa pengelolaan data yang baik sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan memperbaiki kebijakan terkait tata kelola kependudukan.

Keterpaduan antara data statistik administrasi dengan proses perbaikan kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam pandangan publik. Ketika kebijakan dapat dibuktikan berdasarkan data dan analisis yang akurat, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini juga memperkuat prinsip good governance yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, statistik administrasi berfungsi sebagai fondasi empiris yang sangat penting dalam perbaikan kebijakan publik. Melalui pemanfaatan data yang sistematis dan analitis, pemerintah mampu menyusun kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan dan kebutuhan masa depan. Pendekatan ini tentu akan mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. Tantangan dalam Pemanfaatan Statistik Administrasi

Meskipun statistik administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung evaluasi dan perbaikan kebijakan publik, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat optimalisasi penggunaan data administrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis bukti. Beberapa tantangan utama yang sering muncul antara lain berkaitan dengan kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, serta kendala teknologi dan infrastruktur.

Pertama, tantangan kualitas data menjadi isu sentral dalam pemanfaatan statistik administrasi. Data yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria akurasi, kelengkapan, konsistensi, serta mutakhir agar dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang valid. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di mana data administrasi yang tersedia tidak lengkap

atau memiliki inkonsistensi antara satu sumber dengan sumber lain. Permatasari et al. (2024) menyoroti bahwa kelemahan dalam kualitas data sering kali berasal dari ketidaksesuaian metode pengumpulan data, minimnya standar pencatatan, serta adanya human error pada tingkat lapangan, yang akhirnya mengurangi kredibilitas statistik administrasi. Selain itu, faktor keterlambatan pembaruan data juga menjadi kendala signifikan sehingga data tidak dapat menggambarkan kondisi terkini secara akurat.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengolahan dan pemanfaatan data statistik administrasi. Pengolahan data yang kompleks membutuhkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan statistik dan analisis kebijakan yang mumpuni. Sayangnya, di banyak instansi pemerintah, masih terdapat keterbatasan tenaga profesional yang kompeten di bidang ini. Febrianti et al. (2023) mengungkapkan bahwa kekurangan sumber daya manusia terampil dalam bidang data science dan analisis kebijakan menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi statistik administrasi, terutama di tingkat daerah. Kurangnya pelatihan dan pembinaan juga menyebabkan SDM yang ada kurang mampu menggunakan teknologi terbaru atau menerapkan teknik analisis data yang lebih canggih.

Ketiga, kendala teknologi dan infrastruktur merupakan tantangan yang tidak kalah pentingnya. Pengelolaan data statistik administrasi dalam skala besar membutuhkan sistem teknologi informasi yang handal dan terintegrasi. Meski telah ada perkembangan teknologi informasi yang pesat, masih banyak daerah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti konektivitas internet yang tidak stabil, perangkat keras dan lunak yang kurang memadai, serta sistem penyimpanan data yang belum terstandarisasi. Studi oleh Ro'son et al. (2024) menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas infrastruktur teknologi antar daerah menyebabkan disparitas dalam kualitas dan kecepatan pengumpulan serta analisis data statistik administrasi, sehingga menghambat proses pemantauan dan evaluasi kebijakan secara optimal.

Selain itu, masalah interoperabilitas sistem juga menjadi kendala yang signifikan. Data administrasi sering kali tersebar di berbagai unit kerja dengan format dan sistem yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk diintegrasikan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan proses analisis menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan duplikasi data atau inkonsistensi hasil evaluasi. Rusdy et al. (2024) menekankan perlunya pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital yang dapat memperlancar pertukaran dan konsolidasi data antar lembaga pemerintah.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta investasi pada teknologi informasi yang memadai. Selain itu, penerapan standar pengumpulan dan pengelolaan data yang ketat serta penguatan regulasi terkait pengelolaan data administrasi juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas statistik administrasi. Dengan demikian, pemanfaatan statistik administrasi dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan publik dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

5. Strategi Optimalisasi Statistik Administrasi dalam Evaluasi Kebijakan

Untuk memaksimalkan peran statistik administrasi dalam evaluasi kebijakan publik, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Optimalisasi ini tidak hanya memerlukan pembenahan teknis dalam pengumpulan dan pengolahan data, tetapi juga transformasi kelembagaan dan peningkatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Strategi-strategi berikut dapat menjadi landasan penting dalam memperkuat fungsi statistik administrasi sebagai alat evaluasi yang andal dan adaptif terhadap perubahan dinamika sosial.

Pertama, peningkatan kualitas dan standarisasi data merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan statistik administrasi. Data yang akurat, lengkap, dan terstandarisasi akan menghasilkan analisis yang valid serta relevan bagi proses evaluasi kebijakan. Permatasari et al. (2024) menyatakan bahwa upaya peningkatan kualitas data administrasi harus mencakup harmonisasi format data antar-lembaga, pembentukan metadata yang jelas, serta penerapan prosedur validasi data secara rutin guna meminimalkan error dan bias dalam proses pengumpulan dan pelaporan data.

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting dalam menunjang strategi ini. SDM yang kompeten di bidang statistik dan kebijakan publik dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data secara profesional dan menyeluruh. Febrianti et al. (2023) menekankan bahwa pelatihan teknis berkelanjutan untuk analis kebijakan dan petugas statistik perlu difokuskan pada keterampilan analisis data berbasis perangkat lunak terkini seperti R atau Python, serta kemampuan dalam menerjemahkan hasil data menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional. Di samping itu, penguatan kapasitas juga mencakup peningkatan pemahaman terhadap pendekatan evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy).

Ketiga, pembangunan dan modernisasi infrastruktur teknologi informasi merupakan prasyarat penting dalam mendukung pengelolaan statistik administrasi yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Ro'son et al. (2024) menggarisbawahi bahwa digitalisasi sistem pengumpulan data, penggunaan cloud computing, dan pengembangan dashboard analitik interaktif dapat mempercepat siklus evaluasi dan mendukung transparansi publik. Dengan adanya infrastruktur TI yang andal, proses pengolahan dan visualisasi data dapat dilakukan secara real-time, sehingga pengambilan keputusan pun menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Keempat, peningkatan kolaborasi antar-lembaga menjadi strategi kunci dalam menyatukan kekuatan data dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga riset, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Menurut Rusdy et al. (2024), kolaborasi yang kuat dapat memfasilitasi integrasi data lintas sektor, mempercepat verifikasi data, serta memperluas perspektif dalam interpretasi hasil evaluasi kebijakan. Sinergi ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat akuntabilitas publik terhadap hasil evaluasi yang dilakukan.

Selain keempat strategi utama tersebut, perlu juga adanya penguatan regulasi dan kebijakan nasional terkait pengelolaan data administrasi. Aturan yang jelas dan tegas akan mendorong konsistensi dalam pelaporan data serta mencegah manipulasi atau penyalahgunaan informasi. Pemerintah juga perlu membangun budaya data (data culture) di kalangan birokrasi dan pengambil kebijakan, agar penggunaan data menjadi kebiasaan dalam setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, statistik administrasi akan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data. Optimalisasi ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perumusan dan evaluasi kebijakan publik, memperkuat legitimasi keputusan pemerintah, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

SIMPULAN

Statistik administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam evaluasi kebijakan publik, mulai dari pengumpulan data yang relevan, pemantauan kebijakan, hingga perbaikan kebijakan berdasarkan temuan empiris. Dengan memanfaatkan statistik administrasi secara optimal, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis bukti. Namun, masih terdapat

berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas data, pengembangan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan statistik administrasi untuk kebijakan publik yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, N. A., Devi, A. S., Arifah, A. S., Maulidina, N. D., Putri, M. R., Arum, B. M., & Angin, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i1.5299>.
- Khairu Nissa, N., Nugraha, Y., Finola, C. F., Ernesto, A., Kanggrawan, J. I., & Suherman, A. L. (2020). Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta. *Jurnal Sistem Cerdas*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.37396/jsc.v3i2.77>.
- Permatasari, I., Terttiaavini, T., Heryati, A., & Saputra, T. S. (2024). Evaluasi Layanan Publik pada Platform E-Government menggunakan Indeks Layanan Publik Elektronik dan Metode Importance Performance Analysis. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(2). <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1230>.
- Rojab, D. H. (2016). Pengaruh Implementasi Kebijakan Statistik terhadap Manajemen Survei dalam Mewujudkan Efektivitas Kinerja Pegawai Lapangan Badan Pusat Statistik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 10(1). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/129>.
- Ro'son, A., Sawir, M., & Mutjahid, I. M. (2024). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Dengan Menggunakan Aplikasi SIPD Pada Bappeda Kabupaten Mappi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1.2846>.
- Rusdy, M. R. N., Supratiwi, & Marlina, N. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi E-Open di Kota Bekasi Tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47140>.

